

PROSIDING

LOKAKARYA PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN JAWA TIMUR

aan
Timur



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

PROSIDING

Lokakarya Penyusunan Prioritas Program Dan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertanian Jawa Timur

Penyunting:

Ir. Arry Supriyanto, MS.

Ir. M. Cholil Mahfud, MS.

Penyunting Pelaksana:

Drs. Martinus Sugiyarto, MP

Dra. Endang Widajati

Budi Santosa

Suwandoyo



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

Handwritten signature and date
6/11/2000

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Jawa Timur	iii
Rumusan Lokakarya	vii
Daftar Isi	x
Laporan Ketua Panitia Penyelenggara	xii
Arah, Strategi dan Model Pembangunan Pertanian Jawa Timur di Masa Depan <i>Kabul Santoso, Soetrisno dan Jani Januar</i>	1
Optimasi Pemberdayaan Sumberdaya Alam Pertanian dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Bappeda Jawa Timur</i>	18
Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Rangka Otonomi Daerah <i>Effendi Pasandaran</i>	27
Arah dan Kebijaksanaan Balitbangda Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur <i>Balitbangda Jatim</i>	52
Strategi Perakitan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi di Jawa Timur <i>Suyamto H</i>	62
Optimasi Potensi Lestari Sumberdaya dalam Mendukung Pembangunan Perikanan di Jawa Timur <i>Wiadnya, D.G.R; Sutjipto, D.D.; Murachman, Purwodajjanto</i>	76
Reorientasi Program dan Kebijaksanaan Pembangunan Perikanan Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Dinas Perikanan Jawa Timur</i>	102
Reorientasi Program dan Kebijaksanaan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Diperta Tingkat I Propinsi Jawa Timur</i>	110

Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Peternakan Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Padang Bambang Wirjono, Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur</i>	123
Pengembangan Sistem Kediriian Ekonomi Pedesaan <i>Hidayat Nataatmadja</i>	135
Peran LSM Dalam Mendukung Akslerasi Pembangunan Pertanian di Jawa Tumur <i>Hesti R. Wijaya</i>	139
DAFTAR PESERTA	155

LAPORAN KETUA PANITIA PENYELENGGARA

Yang terhormat, Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur,
Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Jawa Timur
Yang terhormat, Ibu Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur
Bapak, Ibu dan hadirin peserta lokakarya yang kami hormati.

***Assalammualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
selamat beraba hagia bagi yang beragama selain Islam.***

Pertama-tama marilah kita secara bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan nikmat dan ridloNYA semata pada siang hari ini kita diberi kesempatan berkumpul untuk melaksanakan serangkaian acara Lokakarya Penyusunan Prioritas Program dan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertanian Jawa Timur. Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta.

Bapak Gubernur, Bapak Kepala Diperta, Ibu Kepala Kanwil, dan hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini perlu kami laporkan bahwa lokakarya ini diselenggarakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso, Malang selama 2 (dua) hari, pada tanggal 7 sampai dengan 8 bulan Maret tahun 2000, di Hotel Cendana Jalan Kombes. M. Durijat nomor 6 Surabaya. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk menyusun prioritas program dan perencanaan strategis pembangunan pertanian menyongsong otonomi daerah Propinsi Jawa Timur, yang akan membahas 11 (sebelas) judul makalah terdiri atas:

1. Arah, Strategi dan Model Pembangunan Pertanian Jawa Timur di Masa Depan
2. Optimasi Pemberdayaan Sumberdaya Alam Pertanian Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur
3. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Rangka Otonomi Daerah
4. Arah dan Kebijaksanaan Balitbangda dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Di Jawa Timur

5. Strategi Perakitan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi di Jawa Timur
6. Optimasi Potensi Lestari Sumberdaya Alam Perikanan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Jawa Timur
7. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Perikanan Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur
8. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur
9. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Peternakan Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur I
10. Pengembangan Sistem Kedirian Ekonomi Pedesaan
11. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Pertanian di Jawa Timur

Bapak, ibu serta hadirin yang kami hormati

Lokakarya kali ini diikuti oleh 66 peserta yang berasal dari :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
2. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi,
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur,
4. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur,
5. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur,
6. Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur,
7. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian,
8. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat,
9. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao,
10. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia,
11. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso,
12. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Timur,
13. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Timur
14. Lembaga Swadaya Masyarakat,
15. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Propinsi Jawa Timur dan
16. Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA)

Dengan segala kerendahan hati kami segenap panitia pelaksana mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta bapak, ibu dalam lokakarya ini, sekaligus kami mohon maaf apabila selama pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya lokakarya ini.

Kami berharap mudah-mudahan hasil dari lokakarya ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengambil kebijaksanaan dalam rangka menyusun prioritas program dan perencanaan strategi pembangunan pertanian untuk memadukan langkah guna menyongsong otonomi daerah Propinsi Jawa Timur .

Akhirnya kami mohon kepada Bapak Imam Utomo, selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur memberikan pengarahan sekaligus membuka lokakarya ini secara resmi.

***Sekian terima kasih
Wassalammualaikum warohmatullahi
wabarokatuh.***

Maret, 2000

Panitia Pelaksana

**ARAH DAN KEBIJAKSANAAN BALITBANGDA
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN
DI JAWA TIMUR**

Balitbangda Jawa Timur

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat yang diikuti dengan perubahan fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang nantinya mampu meningkatkan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat dan daerah.

Konsekuensi dan seiring wujud yang jelas dari perubahan fundamental adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan pendapatan pusat dan daerah. Dimana substansi dan makna dari undang-undang tersebut adalah desentralisasi politik atau "devolutif" dan menurut Rondinelli ciri utama dari devolutif yaitu otonomi daerah. Dampak yang disebabkan dari kedua undang-undang tersebut telah berpengaruh pada perubahan tatanan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah yaitu instansi vertikal dan horisontal di pemerintah pusat maupun daerah banyak yang dilikuidasi dan ditata ulang kelembagaannya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Propinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2000 tanggal 18 Pebruari 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Timur, sebagai lembaga teknis yang melaksanakan tugas-tugas fungsional tentang penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. BALITBANGDA diharapkan mampu memberikan masukan kepada gubernur sebagai kebijakan publik sehingga menghasilkan suatu rumusan kebijaksanaan gubernur sebagai kebijaksanaan politik. Keberadaan BALITBANGDA yang mendapat dukungan dari DPRD Propinsi Jawa Timur lahir mendasarkan pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagai lembaga yang lahir di

era Paradigma Indonesia Baru, diharapkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan lebih berkualitas dan independen. Yang dalam pelaksanaannya didukung dari lembaga-lembaga penelitian (UPT-UPT Departemen) yang sudah diotonomikan ke propinsi dan perguruan tinggi.

A. Maksud penelitian dan pengembangan di BALITBANGDA

- Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis untuk mendapatkan informasi dengan menemukan fakta-fakta, hal-hal baru, menguji kebenaran atau ketidak-benaran suatu teori, anggapan atau hipotesis, sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau sosial dalam konteks pembangunan.
- Pengembangan adalah kegiatan tindak-lanjut penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara menggunakan teori dan proses-proses, untuk tujuan-tujuan praktis dalam suatu konteks dan kegunaan.

B. Kedudukan, tugas dan fungsi

1. Kedudukan

- a. BALITBANGDA adalah lembaga teknis yang melaksanakan tugas-tugas fungsional tentang penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Timur yang berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada gubernur.
- b. BALITBANGDA dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DPRD.

2. Tugas

BALITBANGDA mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud di atas, BALITBANGDA mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan merumuskan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;

- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi, serta kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta
- e. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

C. Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan sistem kebijaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang berlandaskan hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan melalui metodologi riset dalam rangka meningkatkan kualitas rumusan strategis kebijaksanaan pembangunan daerah Jawa Timur.

Misi

Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka BALITBANGDA Propinsi Jawa Timur perlu melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang PUOD dan aparatur pemerintahan; pembangunan yang berwawasan lingkungan; sosial politik dan sosial budaya, perekonomian dan keuangan daerah melalui penyusunan program yang mantap dan terencana sehingga menghasilkan rumusan kebijaksanaan gubernur sebagai kebijaksanaan politik.

D. Identifikasi permasalahan dan kendala pembangunan

1. Umum

Selain permasalahan pada kehidupan berketatanegaraan, seperti bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tersebut pada abstrak di atas, Indonesia harus tetap waspada karena arus globalisasi yang ditandai dengan

perjanjian AFTA tahun 2003, APEC tahun 2020 dan GATT serta mendasarkan pada mekanisme pasar ("*market oriented*"), nyaris tak terbedung oleh negara manapun. Teknologi komunikasi dan informasi membuat batasan hanyalah batasan imajiner di atas peta. Pemeran utama dalam globalisasi ini adalah modal dan teknologi yang seolah-olah tidak bertuan. Hanya agak berbeda dengan modal, teknologi yang "*embodied*" dengan sumberdaya manusia (SDM) masih lebih terikat dengan sistem suatu negara.

Indonesia dengan kekayaan alam melimpah namun disadari bukanlah sesuatu yang langgeng, yang secara keseluruhan proses pembangunan daya saing nasional bertumpu pada sektor industri itu, kita berusaha beralih dari keunggulan komparatif (*comparative base industry*) ke proses keunggulan kompetitif (*competitive base industry*) karena penggunaan teknologi tepat guna. Kegiatan yang dikenal sebagai "*trasformasi industri*" tersebut dalam konteks ini utamanya dimaksudkan mencakup pada kegiatan usaha pertanian yang sangat strategis.

Permasalahannya adalah bagaimana proses peralihan tersebut dapat berjalan lebih cepat, sehingga Propinsi Jawa Timur mampu memanfaatkan momentum yang ada. Peranan lembaga-lembaga penelitian pertanian, perguruan tinggi sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam mendukung konsep "*competitive economic advantage*" diantaranya yang mendesak adalah swasembada pangan dapat terwujud kembali. Dan tantangan sekarang dan ke depan adalah "*swasembada di bidang iptek pertanian*".

2. Pertanian

Masalah yang dihadapi sekarang ini dalam pembangunan pertanian pada umumnya tidak banyak berubah utamanya berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan petani, peningkatan produktivitas dan mutu produk, untuk pengamanan swasembada pangan, penyediaan bahan industri dan peningkatan ekspor. Kendala yang sering ditemukan adalah pemilikan lahan pertanian yang sangat sempit, modal usahatani yang minim, tidak tersedianya mesin pertanian secara cukup, umur petani yang semakin tua, kurangnya minat generasi muda untuk memilih lapangan pekerjaan di bidang usahatani dan terus menyusutnya lahan pertanian oleh perluasan sarana/prasarana industri, perkantoran, perumahan, sarana usaha dan rekreasi.

Beberapa masalah yang perlu ditangani dalam pembangunan pertanian di Jawa Timur, adalah :

- a. Tanaman pangan produktivitasnya belum optimal, karena belum tersedianya rakitan teknologi yang bersifat spesifik lokasi, pemanfaatan sumberdaya belum optimal, serta skala usahatani kecil-kecil dan terpecah mempengaruhi efisiensi produk dan pemasarannya;
- b. Tanaman hortikultura meliputi tersedianya bibit varietas unggul terbatas, lahan usaha dan unit-unit kecil, biaya produksi yang tinggi, penggunaan pestisida dosis berlebihan, transfer teknologi belum optimal serta hama dan penyakit yang belum dapat dikendalikan;
- c. Perkebunan rakyat masih menunjukkan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil, belum terpenuhinya standar ekspor, belum efisiennya manajemen usahatani, rendahnya tingkat harga jual, benih/bibit unggul belum memenuhi kebutuhan dalam jumlah dan kualitas;
- d. Produktivitas ternak umumnya masih rendah karena kurang tersedianya bibit dan bahan pakan (biji-bijian dan pakanan ternak), belum terpenuhinya kebutuhan gizi ternak, serta pengendalian penyakit dan budidaya kurang tepat. Skala usaha ternak umumnya kecil, peran kelembagaan petani masih lemah, daya saing produk ternak masih lemah, penerapan/adopsi teknologi berjalan lambat, sehingga pendapatan petani belum optimal.
- e. Pemanfaatan perairan lepas pantai dan ZEE untuk usaha perikanan belum optimal, intensifikasi budidaya dan kemampuan petani nelayan sebagian besar masih rendah, serta belum tersedianya alat tangkap yang terjangkau petani nelayan;
- f. Perluasan lahan pertanian ke daerah-daerah yang kurang sesuai akibat tekanan kebutuhan penduduk, makin bertambahnya lahan kritis yang menimbulkan kemerosotan fungsi lahan sebagai media produksi maupun fungsi lindung, serta
- g. Pemasaran produk pertanian umumnya belum efisien, sehingga harga jual di tingkat petani rendah.

ARAH DAN KEBIJAKSANAAN BALITBANGDA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN DI JATIM

Sebagaimana dalam abstrak di atas disebutkan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, substansi dan maknanya adalah desentralisasi politik atau "devolutif" yang ciri utamanya otonomi daerah. Dampak yang disebabkan dari kedua Undang-undang tersebut telah berpengaruh pada perubahan tatanan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah, sehingga banyak yang dilikuidasi dan ditata ulang kelembagaannya. Termasuk di dalamnya lembaga-lembaga penelitian yang merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari departemen yang berada di Propinsi Jawa Timur, kewenangan pengelolaan kelembagaannya akan diserahkan kepada pemerintah Propinsi Jawa Timur. Hal ini oleh karena Propinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

1. Kewenangan Propinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom, mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota.
2. Kewenangan Propinsi Jawa Timur sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, dimana salah satu kewenangannya di bidang penelitian.

A. Upaya koordinator dan pemberdayaan

Pembentukan kelembagaan BALITBANGDA Propinsi Jawa Timur adalah untuk melaksanakan salah satu kewenangan Propinsi Jawa Timur sebagai wilayah administrasi yaitu di bidang penelitian.

BALITBANGDA Propinsi Jawa Timur melaksanakan penelitian dan pengembangan pada lingkup policy dan development research yang arahnya pada penelitian dan pengembangan mengenai kebijakan publik. Sedangkan lembaga-lembaga penelitian (UPT) dan perguruan tinggi melaksanakan penelitian dan pengembangan pada sektor dan science yang arahnya pada penelitian dan pengembangan teknis.

Dengan memperhatikan kenyataan riil yang terjadi pada saat ini sebagaimana tersebut di atas, maka lembaga-lembaga penelitian (UPT) sebagaimana tersebut di atas menjadi lembaga-lembaga penelitian daerah (UPTD), oleh karena itu pembinaan dan koordinasinya berada di bawah BALITBANGDA Propinsi Jawa Timur.

B. Arah

Dalam pembangunan pertanian, BALITBANGDA Propinsi Jawa Timur menilai sangat pentingnya "tahapan penelitian" yang merupakan bagian integral dan langkah awal bagi pembangunan pertanian yang berperan menyediakan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan umpan ke depan bagi pembangunan pertanian.

Penelitian ke depan diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem pertanian tangguh dan mampu memberikan sumbangan dalam swasembada pangan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan teknologi dan IPTEK pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, serta kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung pada kegiatan yang terkait dengan pertanian.

Arah untuk pencapaian pembangunan pertanian ke depan masih tetap diarahkan pada program-program :

1. Pembangunan pertanian rakyat terpadu, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memantapkan swasembada pangan melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas pertanian rakyat, dengan mengembangkan sentra-sentra komoditas unggulan sesuai dengan agroekosistem dan perwilayahan komoditas;
2. Pembangunan usaha pertanian, yang ditujukan untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan guna memperoleh nilai tambah dengan dukungan modal, teknologi, manajemen dan akses pasar;

3. Deversifikasi pangan dan gizi, yang bertujuan untuk meningkatkan penganekaragaman pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu, meningkatkan mutu pangan dan gizi masyarakat, serta meningkatkan ketersediaan pangan yang bermutu dan gizi di tingkat rumah tangga.

C. Kebijakan

Pada tingkat nasional, Propinsi Jawa Timur menjadi produsen utama komoditas pertanian oleh karena memiliki ragam komoditas yang sangat besar, termasuk padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, sorgum, ubi kayu, ubi jalar, mangga, pepaya, pisang, salak, apel, kentang, kubis, bawang merah, bawang putih, sapi potong, ayam buras, sapi perah, domba, bandeng, udang, tembakau dan kapas. Oleh karena masing-masing komoditas tersebut merupakan lapangan kerja utama masyarakat, maka pemerintah Propinsi Jawa Timur berusaha memajukan usahataniya untuk pemenuhan kebutuhan konsumen maupun peningkatan pendapatan petani.

Kebijakan yang menjadi fokus pembangunan pertanian Jawa Timur masih erat kaitannya dengan perubahan kondisi lingkungan strategi baik global, regional dan domestik.

Sehubungan hal tersebut, maka pembangunan pertanian ke depan masih diwarnai dengan upaya pemulihan krisis ekonomi, yang difokuskan pada 4 aspek pokok, yaitu:

1. Peningkatan ketahanan pangan
2. Swasembada pangan dapat terwujud kembali
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam hal ini petani, peternak dan nelayan
4. Peningkatan produksi dan daya saing komoditi ekspor dan substitusi impor

Keempat fokus tersebut saling terkait dengan pengertian, bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan, swasembada pangan dan peningkatan devisa ekspor dilaksanakan dengan asas manfaat bagi pemberdayaan ekonomi petani, peternak dan nelayan.

PENUTUP

- A. Lembaga-lembaga penelitian yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari departemen yang berada di Propinsi Jawa Timur, kewenangan pengelolaan kelembagaannya akan diserahkan kepada pemerintah Propinsi Jawa Timur, maka lembaga-lembaga penelitian (UPT) sebagaimana tersebut di atas akan menjadi lembaga-lembaga penelitian daerah (UPTD), yang pembinaan dan koordinasinya berada dibawah BALITBANGDA Propinsi Jawa Timur.

Koordinasi dan integrasi antara lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta (LSM maupun pengusaha/masyarakat) khususnya dalam menangani kegiatan pertanian perlu ditingkatkan, peningkatan ini akan mendorong saling memanfaatkan terhadap kegiatan dan hasil penelitian.

Untuk merealisasi maksud tersebut salah satu upaya sedang dirancang terbentuknya sebur forum komunikasi penelitian dan pengembangan pertanian di Jawa Timur, dimana BALITBANGDA Propinsi Jawa Timur turut serta membidani.

- B. Pentingnya tahapan penelitian yang merupakan bagian integral dan langkah awal bagi pembangunan pertanian yang berperan menyediakan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan umpan kedepan bagi pembangunan pertanian. Penelitian ke depan diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem pertanian tangguh dan mampu memberikan sumbangannya dalam swasembada pangan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan teknologi dan IPTEK pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, serta kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung pada kegiatan yang terkait dengan pertanian.
- C. Kebijakan yang menjadi fokus pembangunan pertanian Jawa Timur masih erat kaitannya dengan perubahan kondisi lingkungan strategi baik global, regional dan domestik. Sehubungan hal tersebut, maka pembangunan pertanian ke depan masih diwarnai dengan upaya pemulihan krisis ekonomi yang difokuskan pada 4 (empat) aspek pokok, yaitu :
1. Peningkatan ketahanan pangan
 2. Swasembada pangan dapat terwujud kembali

3. Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam hal ini petani, peternak dan nelayan
4. Peningkatan produksi dan daya saing komoditi ekspor dan substitusi impor

Keempat fokus tersebut saling terkait dengan pengertian, bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan, swasembada pangan dan peningkatan devisa ekspor dilaksanakan dengan asas manfaat bagi pemberdayaan ekonomi petani, peternak dan nelayan.

- D. Dengan memahami segala permasalahan dan persoalan yang melingkupi pembangunan Jawa Timur ke depan, khususnya pembangunan pertanian, maka BALITBANGDA Propinsi Jawa Timur akan selalu berusaha mendukung dan mengakomodasi kegiatan dan hasil penelitian yang dilakukan balai penelitian/pengkajian, perguruan tinggi dan swasta di bidang pertanian bagi keberhasilan pembangunan pertanian di pemerintahan Propinsi Jawa Timur.

DAFTAR HADIR

No	Nama	Instansi
1.	A. Latief Abadi	FP. Unibraw
2.	Achmadi	KTNA Lamongan
3.	Agus Sugiyatno	IPPTP Tlekung
4.	Agus Suryadi	BPTP Karangploso
5.	Anang Triwiratno	IPPTP Tlekung
6.	Arry Supriyanto	IPPTP Tlekung
7.	Balitbangda Jatim	Balitbangda Tk. Prop. Jatim
8.	Bambang Pamudji	IPPTP Wonocolo
9.	Bambang Siswanto	IPPTP Wonocolo
10.	Bangun Nusantoro	BPTP Karangploso
11.	Bappeda	Bappeda Tk. I Prop. Jatim
12.	Baswarsiati	BPTP Karangploso
13.	Budi Santosa	BPTP Karangploso
14.	Damat	FP Unmuh Malang
15.	Didik Budi Wijono	IPPTP Grati
16.	Didik Sulistyanto	Lemlit Univ. Jember
17.	Dini Hardini	BPTP Karangploso
18.	Diperta Pangan Daerah	Diperta Pangan Daerah Tk. I Jatim
19.	Djoma'ijah	IPPTP Tlekung
20.	Dwi Setyorini	BPTP Karangploso
21.	Eddy Purnomo	IPPT Wonocolo
22.	Effendi Pasandaran	P4 Badan Litbang Pertanian
23.	Endah Retnaningtyas	BPTP Karangploso
24.	F. Kasijadi	BPTP Karangploso
25.	Forita Dyah Arianti	BPTP Ungaran
26.	Gatot Subiyanto	BIPP Lamongan
27.	Gunawan Sukarso	P3GI Pasuruan
28.	Hendarto	Kanwil BRI
29.	Hendri Arianto	IPPTP Tlekung
30.	Heru Sudarsono	BPTP Karangploso
31.	Hesti R. Wijaya	Yayasan Pengembangan Pedesaan (LSM)
32.	Hidayat Nataatmadja	PSE Bogor

- | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------|
| 33. | HM. Kadir Rasyidi | KTNA Tk. I Jatim |
| 34. | I Made Rai Yasa | IPPTP Denpasar |
| 35. | I.G.A.K. Sudarmaja | IPPTP Denpasar |
| 36. | Iffah Irsjadina | BPTP Karangploso |
| 37. | Kabul Santoso | Universitas Jember |
| 38. | Karimah | BAPPEDA Tk. I Jatim |
| 39. | Kusdiarianto | Diperta Tk. I Jatim |
| 40. | Luki Rosmahani | BPTP Karangploso |
| 41. | Lukman Affandy | IPPTP Grati |
| 42. | M. Ali Yusran | IPPTP Wonocolo |
| 43. | M. Cholil Mahfud | BPTP Karangploso |
| 44. | M. Soleh | BPTP Karangploso |
| 45. | Mochtar Effendy | BIPP Jombang |
| 46. | Muchari | BPTP Lembang |
| 47. | Mutia Erti Devi | IPPTP Tlekung |
| 48. | Nunuk Sunu SW | BLPP Ketindan |
| 49. | Nurul Istiqomah | BPTP Karangploso |
| 50. | Padang Bambang W | Dinas Peternakan Daerah Tk. I Jatim |
| 51. | Pudji Santosa | BPTP Karangploso |
| 52. | Pudjiyanto | Puslit Kopi & Kakao |
| 53. | Pudyantono | Diperta Lamongan |
| 54. | Rina EW | BPTP Karangploso |
| 55. | Roesmiyanto | BPTP Karangploso |
| 56. | Ruly Hardianto | BPTP Karangploso |
| 57. | Sarjana | BPTP Ungaran |
| 58. | Sarwiyono | Faperta Unibraw |
| 59. | Sentot R. Soemarsono | BPTP Karangploso |
| 60. | Siti Hartanti | FP. Univ. Jember |
| 61. | Sjaiful Chanafi | BPTP Karangploso |
| 62. | Soehartono | Diskan Tk. I Jatim |
| 63. | Sri Hartiningsih | BLPP Batu |
| 64. | Sri Prapti | Kanwil Pertanian |
| 65. | Sri Yuniastuti | BPTP Karangploso |
| 66. | Suhardjo | BPTP Karangploso |
| 67. | Suhartono | Dinas Perikanan Daerah Tk. I Jatim |
| 68. | Sukarno Roesmarkam | BPTP Karangploso |

- | | | |
|-----|---------------|------------------|
| 69. | Supangat | BPTP Karangploso |
| 70. | Suprptono | Diperta Jombang |
| 71. | Sutanto JT | IPPTP Wonocolo |
| 72. | Suwandi | IPPTP Wonocolo |
| 73. | Suwarso | Balittas Malang |
| 74. | Suwono | BPTP Karangploso |
| 75. | Suyanto H | BPTP Karangploso |
| 76. | Uum Umiyasih | IPPTP Grati |
| 77. | Wiadnya DGR | Faperta Unibraw |
| 78. | Wigati Istuti | IPPTP Wonocolo |
| 79. | Yoga Ekawati | IPPTP Wonocolo |
| 80. | Yudha Sukardi | IPPTP Wonocolo |